

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA 2026
BPTU HPT PADANG MENGATAS**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU HPT PADANG MENGATAS
018.06.0800.239434.000.KD**

Jl. Padang Mengatas PO BOX 03, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU SP Padang Mengatas adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU SP Padang Mengatas. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lima Puluh Kota, 14 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HAJUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX03. Payakumbuh 26201
Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail:bptu_patas@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh Kota, 14 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

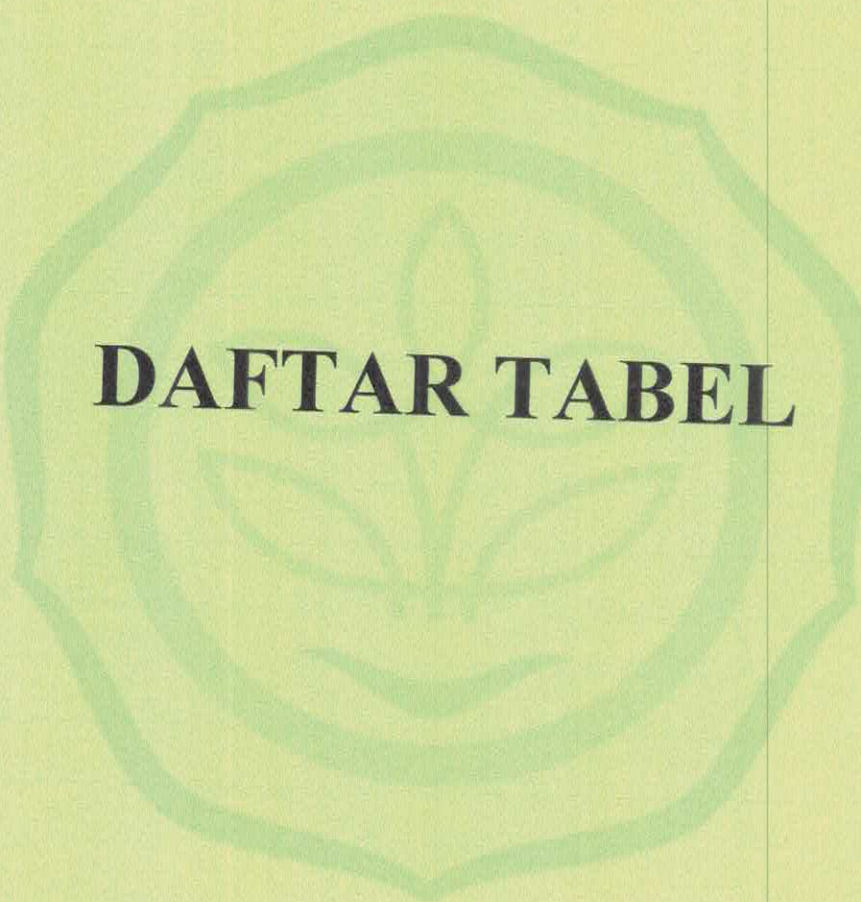
NIP. 197504232002121001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	i
Ringkasan Laporan Keuangan	ii
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester I TA 2026	28
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU Semester I TA 2026	28
Tabel B.1.1.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN Lainnya Semester I TA 2026	29
Tabel B.1.1.2	Rincian Rumah Negara	30
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026	31
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026 Berdasarkan Program	31
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026	31
Tabel B.2.1.2	Pengembalian Belanja Pegawai Semester I TA 2026	32
Tabel B.2.1.3	Jumlah Pegawai per Juni 2026	32
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis	33
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026	35
Tabel B.2.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026	35
Tabel B.2.3.3	Rincian Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026	35
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026	35
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester I TA 2026	35
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2026	36
Tabel C.1	Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025	37
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025	37
Tabel C.5.1	Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025	39
Tabel C.5.2	Mutasi Persediaan per 30 Juni 2026	39
Tabel C.5.3	Perbandingan antara realisasi belanja dengan transaksi persediaan	40
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025	41
Tabel C.6.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	41
Tabel C.6.2	Rincian Tanah	41
Tabel C.7.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	42
Tabel C.7.2	Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin	42
Tabel C.8.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	42
Tabel C.9.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	43
Tabel C.11.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025	43
Tabel C.13.1	Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 2025	44
Tabel C.14.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	43
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025	46
Tabel C.15.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025	46
Tabel C.16.1	Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025	47

Tabel D.1	Kegiatan Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025	49
Tabel D.1.1	Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025	49
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	50
Tabel D.2.1	Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025	51
Tabel D.2.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	51
Tabel D.3.1	Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025	53
Tabel D.3.2	Perbandingan Belanja dan Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	53
Tabel D.3.3	Mutasi Persediaan Sebagai Pembanding LRA dan LO Per 30 Juni 2026	53
Tabel D.3.4	Perbandingan beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang pada persediaan	54
Tabel D.3.5	Perbandingan Nilai belanja barang persediaan pada LRA dengan jumlah transaksi pembelian	54
Tabel D.3.6	Beban persediaan pada LO	55
Tabel D.4.1	Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025	55
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja dan Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	56
Tabel D.5.1	Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025	57
Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	57
Tabel D.6.1	Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 2025	58
Tabel D.6.2	Perbandingan Belanja dan Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	58
Tabel D.7.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025	59
Tabel D.7.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	59
Tabel D.8.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025	59
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025	60
Tabel D.11.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026	61
Tabel D.12.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026	62
Tabel E.4.3.1	Daftar Transfer Keluar	64
Tabel E.4.4.1	Daftar Transfer Masuk	65

**RINGKASAN LAPORAN
KEUANGAN**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.556.502.934,00 berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.556.502.934,00 atau mencapai 69,18% dari anggaran sebesar Rp2.250.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp11.813.947.887,00 atau mencapai 31,38% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.651.211.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp253.621.879.431,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp25.305.030.613,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp225.829.452.188,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.487.396.630,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.370.951.558,00 dan Rp251.250.927.873,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.447.807.030,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp15.707.754.271,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp-14.259.947.241,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp803.011.515,00 dan Rp0,00 sehingga BPTU HPT Padang Mengatas pada Per 30 Juni 2026 mengalami Defisit- LO sebesar Rp-13.456.935.726,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp245.217.455.682,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-13.456.935.726,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp9.268.500.000,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.221.907.917,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp251.250.927.873,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPTU HPT PADANG MENGATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 2026

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2026
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	2.250.000.000	1.556.502.934	69,18	1.078.542.706
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		2.250.000.000	1.556.502.934	69,18	1.078.542.706
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.422.022.000	3.533.137.666	55,02	3.016.505.973
Belanja Barang	B.2.2	31.229.189.000	8.280.810.221	26,52	11.676.140.229
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	41.585.420
JUMLAH BELANJA NEGARA		37.651.211.000	11.813.947.887	31,38	14.734.231.622

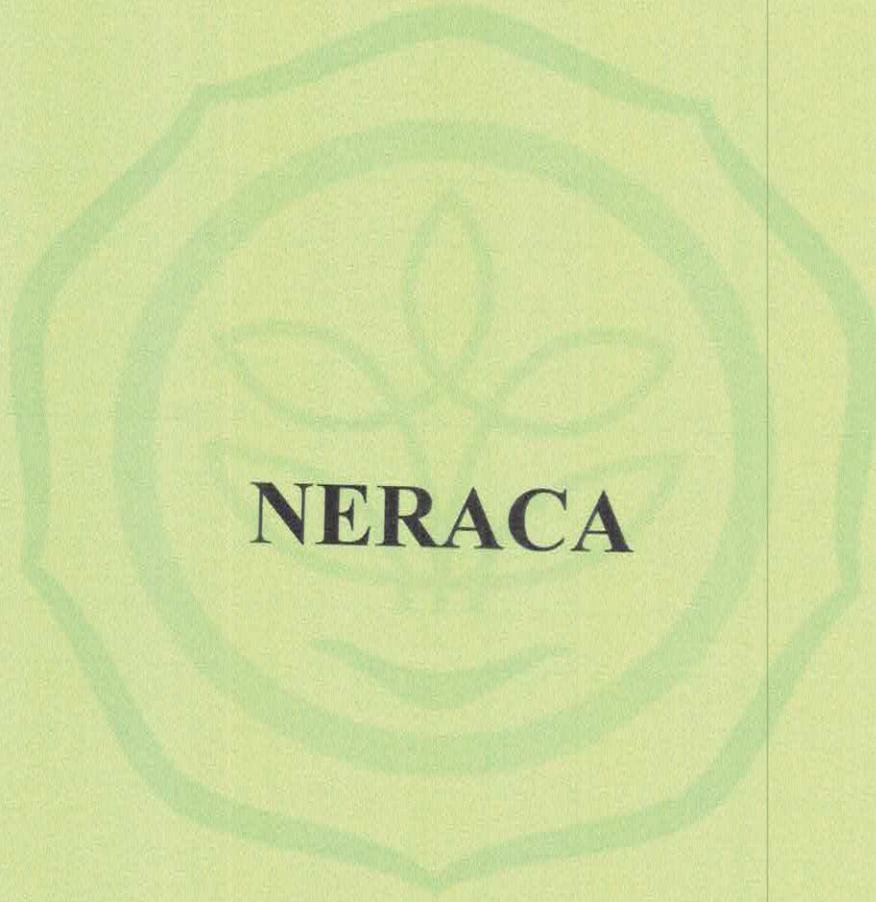
Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001



NERACA

II. NERACA

BPTU HPT PADANG MENGATAS NERACA PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

Uraian			(dalam Rupiah)	
ASET	Catatan	2026	2025	
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	325.000.000	0	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	129	0	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	13.051.000	0	
Piutang Bukan Pajak	C.4	315.482	0	
Persediaan	C.5	24.919.304.002	14.451.655.498	
Persediaan yang Belum Diregister	C.6	47.360.000	0	
JUMLAH ASET LANCAR		25.305.030.613	14.451.655.498	
ASET TETAP				
Tanah				
Peralatan dan Mesin	C.7	155.787.621.000	155.787.621.000	
Gedung dan Bangunan	C.8	22.644.926.101	22.644.926.101	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	54.231.565.743	54.231.565.743	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10	27.440.123.361	27.440.123.361	
Akumulasi Penyusutan	C.11	0	0	
	C.12	(34.274.784.017)	(31.813.450.065)	
JUMLAH ASET TETAP		225.829.452.188	228.290.786.140	
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	0	0	
Aset Lain-lain	C.14	3.345.719.500	3.345.719.500	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(858.322.870)	(817.965.905)	
JUMLAH ASET LAINNYA		2.487.396.630	2.527.753.595	
JUMLAH ASET		253.621.879.431	245.270.195.233	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	1.654.629.574	52.739.551	
Utang yang Belum Ditagihkan	C.17	391.321.984	0	
Uang Muka dari KPPN	C.18	325.000.000	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.370.951.558	52.739.551	
JUMLAH KEWAJIBAN		2.370.951.558	52.739.551	
EKUITAS				
Ekuitas	C.18	251.250.927.873	245.217.455.682	
JUMLAH EKUITAS		251.250.927.873	245.217.455.682	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		253.621.879.431	245.270.195.233	

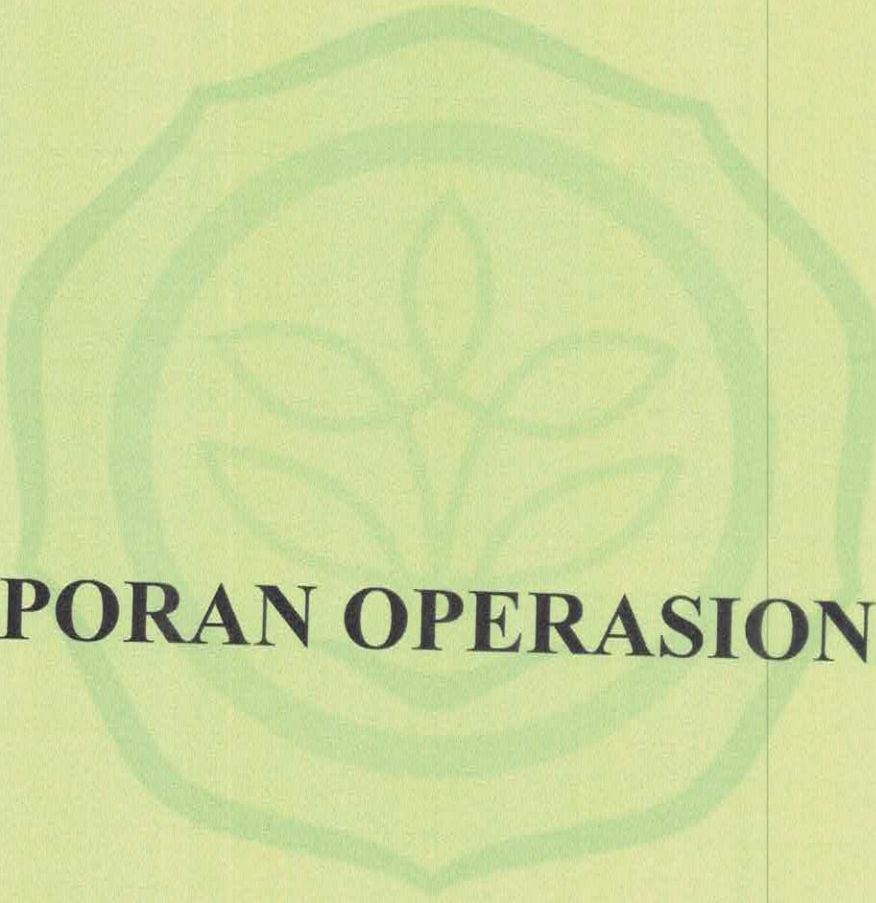
Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTU HPT PADANG MENGATAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2026 DAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Catatan	2026	(dalam Rupiah) 2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.447.807.030	1.069.182.881
JUMLAH PENDAPATAN		1.447.807.030	1.069.182.881
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.916.276.004	3.388.501.708
Beban Persediaan	D.3	3.515.935.260	1.751.210.250
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.666.974.442	2.774.515.587
Beban Pemeliharaan	D.5	2.848.178.639	3.752.743.100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	258.699.009	92.445.111
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.501.690.917	2.690.784.541
JUMLAH BEBAN		15.707.754.271	14.450.200.297
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.259.947.241)	(13.381.017.416)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(1.325.514.000)	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	11.486.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	1.337.000.000	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		2.128.525.515	940.705.960
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	2.128.525.515	940.705.960
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		803.011.515	940.705.960
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.13	0	0
BEBAN LUAR BIASA	D.14	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.15	(13.456.935.726)	(12.440.311.456)

Padang Mengatas, 14 Juli 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P
 NIP. 197504232002121001

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPTU HPT PADANG MENGATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2026 DAN 2025
(AUDITED)

		(Dalam Rupiah)	
Uraian	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	245.217.455.682	244.157.132.794
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	(13.456.935.726)	(12.440.311.456)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	9.268.500.000	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	9.268.500.000	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-	-
Koreksi Lain-lain	E.3.4	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.221.907.917	13.673.688.916
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	6.033.472.191	1.233.377.460
EKUITAS AKHIR	E.6	251.250.927.873	245.390.510.254

Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P
NIP. 197504232002121001

**CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU HPT Padang Mengatas

Pada tanggal 24 Mei 2013 Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jl. Padang Mengatas Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota. PO BOX. 03 Payakumbuh 26201. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Untuk mewujudkan tujuan, BPTU HPT berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Per 30 Juni 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

“Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul dan ternak hasil seleksi serta benih/bibit hijauan pakan ternak”.

Fungsi

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- c. pelaksanaan budi daya ternak unggul dan ternak hasil seleksi;
- d. pelaksanaan uji performa dan/atau uji zuriat ternak unggul dan hasil seleksi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- f. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul dan ternak hasil seleksi;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
- i. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- j. penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- k. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit ternak unggul, ternak hasil seleksi dan hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana teknis;
- n. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- o. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

Sedangkan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BPTU-HPT.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU HPT Padang Mengatas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

SAKTI terdiri dari General Ledger dan Pelaporan (GLP) serta Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan. SAKTI modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul BMN dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU HPT Padang Mengatas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTU HPT Padang Mengatas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2026 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNPB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang

digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;

- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timhul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai

masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati

seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap Semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

7) **Persediaan**

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, BPTU HPT Padang Mengatas sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup BPTU HPT Padang Mengatas.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan BPTU HPT Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini BPTU HPT Padang Mengatas belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan BPTU HPT Padang Mengatas.

c. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

d. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap Semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

e. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu

diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2026 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun

- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. DIPA BPTU HPT Padang Mengatas Semester I TA 2026 dengan No. SP-DIPA-018.06.2.239434/2026 tanggal 2 Desember 2025 senilai Rp34.244.816.000. Kemudian terdapat beberapa kali revisi setelahnya dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 pada tanggal 29 Desember 2025 senilai Rp32.617.446.000
- Revisi DIPA 2 pada tanggal 10 Februari 2026 senilai Rp32.617.446.000
- Revisi DIPA 3 pada tanggal 9 Maret 2026 senilai Rp34.122.467.000
- Revisi DIPA 4 pada tanggal 11 Maret 2026 senilai Rp34.122.467.000
- Revisi DIPA 5 pada tanggal 11 April 2026 senilai Rp34.122.467.000
- Revisi DIPA 6 pada tanggal 24 April 2026 senilai Rp34.059.267.000
- Revisi DIPA 7 pada tanggal 9 Mei 2026 senilai Rp34.059.267.000
- Revisi DIPA 8 pada tanggal 6 Juni 2026 senilai Rp37.651.211.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester I TA 2026

Uraian	2026	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.250.000.000	2.250.000.000
Jumlah Pendapatan	2.250.000.000	2.250.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.422.022.000	6.422.022.000
Belanja Barang	27.027.589.000	31.229.189.000
Belanja Modal	795.205.000	0
Jumlah Belanja	34.244.816.000	37.651.211.000

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp1.556.502.934,00 atau 69,18% dari anggaran sebesar Rp2.250.000.000.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Semester I TA 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
425 Pendapatan PNBPN Lainnya	2.250.000.000	1.556.502.934	48,19	1.078.542.706
4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.239.500.000	1.444.592.419	64,50	1.068.836.746
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	10.500.000	14.385.000	137,00	0
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	75.000
4258 Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259 Pendapatan Lain-Lain	0	97.525.515	0,00	9.630.960

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Jumlah	2.250.000.000	1.556.502.934	69,18	1.078.542.706

B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp1.556.502.934,00 atau 69,18% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp2.250.000.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya Semester I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp478.035.228,00 atau 44,33% dibandingkan TA 2025. Hal ini dikarenakan lebih banyaknya penjualan ternak dan lebih banyaknya sewa ruang kelas dan aula pada tahun 2026. Juga terdapat pendapatan dari eduwisata pada Semester I TA 2026 sedangkan pada Semester I tahun 2025 belum ada. Selain itu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu juga lebih besar penerimaannya pada tahun 2026.

Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya Semester I TA 2026.

Tabel B.1.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2026

No	Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN					
	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.220.000.000	1.360.660.000	1.051.635.500	309.024.500	29,39
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		0	1.700.000	(1.700.000)	(100)
	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	19.500.000	72.446.419	15.501.246	56.945.173	367,36
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		6.948.000	0	6.948.000	0
	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III		4.538.000	0	4.538.000	0
	Jumlah	2.239.500.000	1.444.592.419	1.068.836.746	375.755.673	35,16
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	10.500.000	14.385.000	0	14.385.000	0
	Jumlah	10.500.000	14.385.000	0	14.385.000	0
3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan					
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	75.000	(75.000)	(100)
	Jumlah	0	0	75.000	(75.000)	(100)
4	Pendapatan Lain-Lain					
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	97.525.515	9.630.960	87.894.555	912,63
	Jumlah	0	97.525.515	9.630.960	87.894.555	912,63
	Jumlah	2.250.000.000	1.556.502.934	1.078.542.706	478.035.228	44,33

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya Semester I TA 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.444.592.419,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan ternak terdiri dari 138 ekor sapi, rumput/benih yang terdiri dari indigofera batang 560 batang, indigofera biji 1 kg, rumput odot 100 stek, rumput BD 18.000 pols, rumput pakchong 100 stek, rumput gajah Umami 170 stek, Rumput pakan ternak 7.770 kg, dan kompos 11.400 kg
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berasal dari sewa ruang kelas dan mess, sewa rumah dinas. Berikut adalah rincian rumah dinas pada BPTU HPT Padang Mengatas:

Tabel B.1.1.2 Rincian Rumah Negara

URAIAN	Jumlah (unit)
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2
Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat	2
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	3
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	2
Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	10

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berasal dari hasil lelang BMN
 - Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III berasal dari sewa bangunan dari Koperasi.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset. dan Teknologi sebesar Rp14.385.000 merupakan penerimaan yang berasal dari:
 - Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari pendapatan eduwisata.
 3. Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp97.525.515 merupakan penerimaan yang berasal dari:
 - Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu berasal dari Kelebihan Pembayaran Pek. Pemb. Breeding Center Sapi Potong Indonesia oleh PT.Suryamanunggal Wisesa.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester I Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp11.813.947.887,00 atau 31,38% dari anggaran belanja sebesar Rp37.651.211.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	6.422.022.000	3.533.137.666	55,02	3.016.505.973
Belanja Barang	31.229.189.000	8.280.810.221	26,52	11.676.140.229
Belanja Modal	0	0	0	41.585.420
Jumlah	37.651.211.000	11.813.947.887	31,38	14.734.231.622

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester I TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.279.143.000	694.294.909	9,54	1.376.009.581	(49,54)
Program Dukungan Manajemen	30.372.068.000	11.119.652.978	36,61	13.358.222.041	(16,76)
Jumlah	37.651.211.000	11.813.947.887	31,38	14.734.231.622	(19,82)

Realisasi belanja Semester I TA 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2.920.283.735,00 atau 19,82%, apabila dibandingkan TA 2025. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena lebih sedikitnya realisasi belanja barang Tahun 2026 dibandingkan dengan Tahun 2025, dan tidak adanya belanja modal pada Tahun 2026.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3.533.137.666,00 dan Rp3.016.505.973,00. Realisasi belanja Semester I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp516.631.693,00 atau 17,13% dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya perubahan status dari CPNS menjadi PNS pada Tahun 2026, yang diikuti dengan kenaikan gaji. Selain itu pada tahun 2026 PPPK juga telah menerima gaji penuh selama 6 bulan sedangkan pada tahun 2025 baru menerima 2 bulan kerja.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	3.106.988.000	2.019.344.900	64,99	2.009.125.500	0,51
Belanja Pambulan GajiPNS	69.000	29.959	43,42	27.911	7,34
Belanja Tunj. Suami/IstriPNS	298.224.000	173.142.960	58,06	183.460.430	(5,62)
Belanja Tunj. Anak PNS	102.170.000	58.953.976	57,70	59.778.936	(1,38)
Belanja Tunj. StrukturalPNS	25.200.000	14.400.000	57,14	15.165.000	(5,04)
Belanja Tunj. FungsionalPNS	282.952.000	163.534.000	57,80	184.684.000	(11,45)
Belanja Tunj. PPh PNS	23.137.000	21.838.809	94,39	24.471.814	(10,76)
Belanja Tunj. Beras PNS	235.204.000	134.846.040	57,33	136.149.600	(0,96)
Belanja Uang MakanPNS	700.920.000	234.439.000	33,45	208.480.000	12,45
Belanja TunjanganUmum PNS	97.220.000	56.065.000	57,67	49.045.000	14,31
Belanja Uang Lembur PNS	168.000.000	79.344.000	47,23	0	0
Jumlah Belanja kotor	5.040.084.000	2.955.938.644	58,65	2.870.388.191	2,98
Pengembalian BelanjaPegawai		1.085.586	0	20	5,427,8

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
Belanja Gaji Pokok PPPK	948.782.000	390.078.838	41,11	103.744.363	276,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.000	9.144	32,66	2.463	271,25
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	100.394.000	36.498.387	36,36	9.707.017	276,00
Belanja Tunj. Anak PPPK	36.400.000	12.523.187	34,40	3.330.627	276,00
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	9.240.000	5.170.000	55,95	1.375.000	276,00
Belanja Tunj. Beras PPPK	109.498.000	38.575.720	35,23	10.259.500	276,00
Belanja Uang Makan PPPK	87.912.000	59.722.000	67,93	11.303.000	428,37
Belanja Tunjangan Umum PPPK	68.180.000	24.048.332	35,27	6.395.832	276,00
Belanja Uang Lembur PPPK	21.504.000	11.659.000	54,22	0	0
Jumlah Belanja kotor	1.381.938.000	578.284.608	41,85	146.117.802	295,77
Jumlah	6.422.022.000	3.533.137.666	55,02	3.016.505.973	17,13

Rincian Pengembalian belanja Rp1.085.586,00 sebagai berikut:

Tabel B.2.1.2 Pengembalian Belanja Pegawai Semester I TA 2026

URAIAN	Jumlah	Nomor Dokumen	Ket
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	78	SPM Nomor 0175	Kekurangan Gaji PNS bulan April-Mei 2026 untuk 9 pegawai/ 33 jiwa
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	5.508	SPM Nomor 0204	Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2026 Untuk 15 Pegawai
Pengembalian belanja tunjangan umum PNS	1.080.000	SPM Nomor 0204	Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2026 Untuk 15 Pegawai
Jumlah	1.085.586		

Rincian jumlah pegawai per Juni 2026

Tabel B.2.1.3 Jumlah Pegawai per Juni 2026

No	Golongan	Jumlah
	PNS	
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	46 orang
3	Golongan II	21 orang
	PPPK	
4	Golongan IX	2 orang
5	Golongan VII	2 orang
6	Golongan V	15 orang
	Jumlah	90 orang

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp8.280.810.221,00 dan Rp11.676.140.229,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester I TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/turun
Belanja Barang Operasional	4.163.100.000	1.938.494.841	46,56	982.283.260	97,35
Belanja Barang Non Operasional	1.002.864.000	394.054.500	39,29	1.553.351.000	(74,63)
Belanja Barang Persediaan	12.406.149.000	2.946.515.800	23,75	5.113.493.250	(42,38)
Belanja Jasa	615.680.000	214.795.416	34,89	211.216.108	1,69
Belanja Pemeliharaan	7.044.083.000	2.534.758.655	35,98	3.723.351.500	(31,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	653.601.000	252.191.009	38,58	92.445.111	172,80
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	5.343.712.000	0		0	
Jumlah Belanja Kotor	31.229.189.000	8.280.810.221	26,52	11.676.140.229	(29,08)
Pengembalian Belanja		0		0	0
Jumlah	31.229.189.000	8.280.810.221	26,52	11.676.140.229	(29,08)

Realisasi belanja barang Semester I TA 2026 mengalami penurunan sebesar Rp3.395.330.008,00 atau 29,08% dibandingkan TA 2025.

- Belanja barang Operasional mengalami kenaikan pada tahun 2026 sebesar 97,35 dikarenakan adanya perubahan akun yang pada tahun 2025 memakai akun Belanja Barang Non Operasional menjadi Belanja Barang Operasional pada tahun 2026.
- Belanja barang Non Operasional mengalami penurunan pada tahun 2026 sebesar 74,63 dibandingkan TA 2025 dikarenakan adanya perubahan akun yang pada tahun 2025 memakai akun Belanja Barang Non Operasional menjadi Belanja Barang Operasional pada tahun 2026.
- Belanja barang persediaan mengalami penurunan sebesar 42,38 dibandingkan TA 2025, beberapa kegiatan terkait belanja persediaan telah dilakukan kontrak namun belum seluruhnya dilakukan pertanggungjawaban keuangannya pada Semester I TA 2026.
- Belanja jasa mengalami kenaikan sebesar 1,69 % dibandingkan TA 2025
- Belanja pemeliharaan mengalami penurunan 31,92% dibandingkan TA 2025
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami kenaikan 172,80% dibandingkan TA 2025 dikarenakan lebih sedikitnya pagu blokir pada Semester I tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 yang sebagian besar pagunya diblokir sehingga pertanggungjawaban keuangan dapat langsung dilakukan.

Belanja Barang Operasional terdiri dari

- Belanja Keperluan Perkantoran, terdiri dari belanja sehari-hari keperluan kantor, honor PPNPN, konsumsi rapat, jamuan tamu, rapat dengan instansi lain.
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja terdiri dari honor KPA, PPSPM, PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, koordinator, penanggung jawab, anggota UAKPA/Barang, PPABP, pengurus BMN, Petugas Penerima PNBPN atau Anggota, Pejabat Pengadaan dan staf pengelola keuangan.
- Belanja Barang Operasional Lainnya terdiri dari Pengujian sampel penyakit hewan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan HPT, Penanaman dan Pemeliharaan Padang Pengembalaan.

Belanja Barang Persediaan, terdiri dari

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terdiri dari pembelian benih jagung, Pengadaan Bahan Pakan/Pakan Hijauan Pakan Ternak Dewasa, Bahan Pakan/Pakan Sapi Laktasi, Vitamin, desinfektan dan obat ternak, bahan bakar minyak
- Belanja Barang Persediaan bahan baku terdiri dari herbisida dan insektisida.

Belanja Jasa, terdiri dari

- Belanja Langganan Listrik.
- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya terdiri dari jasa internet.
- Belanja Jasa Lainnya terdiri dari pengujian pakan/bahan pakan.
- Belanja Jasa Konsultan terdiri dari Jasa konsultan konstruksi.

Belanja Pemeliharaan, terdiri dari

- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri dari Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor, Bangunan Gedung Kantor Lainnya, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Bengkel /Hanggar Darurat, Pemeliharaan Kandang induk anak, Bangunan Parkir Lainnya, Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen, Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Pemeliharaan Kandang Ramayana D, Pemeliharaan Saluran pengumpul air, Pemeliharaan IPAL dan instalasi air kotor, Pemeliharaan Kandang showroom, Pemeliharaan Bangunan Pengolahan Pupuk Organik, Pemeliharaan gedung SBSN, Pemeliharaan Pagar Paddock Plot 21 dan 23, Pemeliharaan Pagar Paddock Miniranch, Pemeliharaan bak penampung, Bangunan terbuka lainnya (tempat pakan), Bangunan Kolam/Bak Ikan, Pemeliharaan Pagar Paddock Padang Penggembalaan, Pemeliharaan Pagar Paddock,
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan hand mawer, traktor kecil, chopper, trailer pakan ternak, mesin spraying, traktor, genset, rotaslasher, silase baller, double chopper, kendaraan roda 4double kabin, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda3, kendaraan roda 2, komputer dan printer, Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya, Mesin Pupuk, Mesin Gergaji Logam, Alat Processing Lainnya, drone/camera udara, Becholoader, Truk Pengangkut HPT
- Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari Pemeliharaan jalan turunan plot 14, Pemeliharaan dinding penahan tanah(turap) jalan breeding center.

Belanja Perjalanan Dalam Negeri, terdiri dari

- Belanja perjalanan dinas biasa terdiri dari Perjalanan dinas pengembangan investasi peternakan, Perjalanan dinas Bibit Ternak dalam rangka konsultasi dan koordinasi dg instansi lain, Perjalanan dalam rangka pembinaan dan pelayanan purna jual penyebaran bibit ternak, Perjalanan Pendampingan Peningkatan Produksi Bibit, Pendampingan dan Pengawasan Penyebaran Bibit ternak unggul, Koordinasi pengembangan bibit ternak dengan instasi lain, perjalanan koordinasi kegiatan banpem, perjalanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.585.420,00. Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2026 mengalami

penurunan sebesar Rp Rp41.585.420,00 atau 100% dibandingkan periode TA 2025. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alokasi belanja modal pada Tahun 2026.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	41.585.420	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	41.585.420	100

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.585.420,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026 mengalami penurunan sebesar Rp41.585.420,00 atau 100% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	41.585.420	100
Jumlah	0	0	0	41.585.420	100

Penambahan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:

Tabel B.2.3.3 Rincian Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026

Uraian	Jumlah	Nilai
Jumlah		

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp246.183.717.298,00 dan Rp245.270.195.233,00. Saldo Aset per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp10.147.099.590,00 atau 3,92%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lancar	25.305.030.613	14.451.655.498
Aset Tetap	225.829.452.188	228.290.786.140
Aset Lainnya	2.487.396.630	2.527.753.595
Jumlah	253.621.879.431	245.270.195.233

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp25.305.030.613,00 dan Rp14.451.655.498,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp10.853.375.115,00 atau 75,10%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	325.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	129	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	13.051.000	0
Piutang Bukan Pajak	315.482	0
Persediaan	24.919.304.002	14.451.655.498
Persediaan belum diregister	47.360.000	0
Jumlah	25.305.030.613	14.451.655.498

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang

Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp325.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar Rp325.000.000,00 merupakan uang persediaan yang terdiri dari Rp300.000.000,00 uang persediaan dengan sumber dana RM dan Rp25.000.000,00 uang persediaan dengan sumber dana PNPB.

Terdapat selisih antara saldo Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca dengan LPJ yang bernilai Rp338.051.000,00, selisihnya senilai Rp13.051.000,00 yang merupakan saldo UP KKP yang masih ada dalam kas bank bendahara pengeluaran dan belum dilakukan penyetoran.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp129,00 dan Rp0,00.

Saldo Kas ini merupakan saldo jasa giro yang diberikan oleh bank sebagai jasa bagi hasil yang muncul pada akhir bulan, untuk penyelesaian saldo ini telah dilakukan koordinasi dengan pihak bank dan akan dilakukan penyesuaian pada bulan Juli 2026, dikarenakan tidak boleh adanya saldo jasa giro pada rekening pemerintah.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp13.051.000,00 dan Rp0,00.

Saldo Kas ini merupakan saldo UP KKP yang masih ada dalam kas bank bendahara pengeluaran dan belum dilakukan penyetoran. Hal ini dikarenakan SP2D GUP KKP tersebut terbit pada akhir bulan.

C.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp315.482,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp315.482,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan

saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025. Piutang Bukan Pajak merupakan sewa rumah dinas pegawai yang akan dibayarkan melalui potongan SPM Gaji bulan Juli 2026.

C.5. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp24.919.304.002,00 dan Rp14.451.655.498,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp10.467.648.504,00 atau 72,43% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2025. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1 Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Barang Konsumsi	965.397.097	210.974.808	754.422.289	357,59
2	Bahan Baku	2.031.379.400	2.202.502.400	(171.123.000)	(7,77)
3	Persediaan Lainnya	21.922.527.505	12.038.178.290	9.884.349.215	82,11
Total		24.919.304.002	14.451.655.498	10.467.648.504	72,43

Persediaan tersebut di atas dalam dalam kondisi baik, persediaan terdiri dari:

- Barang konsumsi terdiri dari benih jagung, Pengadaan Bahan Pakan/Pakan Hijauan Pakan Ternak Dewasa, Bahan Pakan/Pakan Sapi Laktasi, Vitamin, desinfektan dan obat ternak, bahan bakar minyak, alat tulis, kertas HVS, buku tulis, penjepit kertas, penghapus, ordener dan map, penggaris, cutter, steples, alat perekat, tinta, alat tulis kantor lainnya, perlengkapan penunjang kegiatan kantor lainnya, alat penunjang kedokteran.
- Bahan baku terdiri dari bahan kimia padat (pupuk), semen beku, herbisida dan insektisida.
- Persediaan lainnya terdiri dari obat-obatan, vitamin, vaksin dan sapi yang berasal dari ternak turunan (Simmental, Limousin dan Pesisir)

Sedangkan terdapat Rp116.000.000 persediaan dalam kondisi rusak yaitu berupa sapi ternak turunan yang dijual, dan Rp10.639.200 persediaan usang yang terdiri dari obat dan vitamin yang sudah kadaluarsa, yaitu Injekvit B-Plek 100ml sebanyak 144 botol dan Sulprodon Inj sebanyak 132 botol.

Mutasi Persediaan

Tabel C.5.2 Mutasi Persediaan per 30 Juni 2026

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Barang Konsumsi	210.974.808	4.051.823.800	3.297.401.511	965.397.097
Bahan Baku	2.202.502.400	4.797.000	175.920.000	2.031.379.400
Persediaan Lainnya	12.038.178.290	11.378.962.964	1.494.613.749	21.922.527.505
Jumlah	14.451.655.498	15.435.583.764	4.967.935.260	24.919.304.002

Tabel C.5.3 Perbandingan antara realisasi belanja dengan transaksi persediaan

Uraian	Nilai	Ket
Realisasi Belanja Persediaan	2.946.515.800	
Transaksi Persediaan	6.167.083.764	
Transaksi Pembelian	4.056.620.800	Berasal dari pembelian-pembelian barang persediaan
Transfer Masuk	79.462.964	Vaksin PMK Aphthovet 2026 vitamin, obat dan antibiotik dari Ditjen PKH
Perolehan lainnya	2.031.000.000	Kelahiran sapi
Selisih antara realisasi belanja dengan transaksi persediaan	3.220.567.964	

Selisih antara Realisasi Belanja Persediaan dengan Transaksi Persediaan senilai Rp3.220.567.964,00 dikarenakan

- Selisih transaksi pembelian dikarenakan adanya pembayaran termyn III pengadaan bahan pakan/pakan sapi potong dewasa dengan BAPP 29 Juni 2026 namun SP2D tertanggal 2 Juli 2026 senilai Rp1.110.105.000
- adanya transaksi transfer masuk berupa Vaksin PMK Aphthovet 2026, vitamin, obat dan antibiotik dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp79.462.964.
- Penambahan persediaan lainnya berupa ternak sapi yang lahir pada Tahun 2026 senilai Rp2.031.000.000.

C.6. PERSEDIAAN BELUM DIREGISTER

Saldo Persediaan belum diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp47.360.000,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp47.360.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2025.

Saldo ini berasal dari kesalahan pencatatan tanggal BAST pengadaan obat-obatan ternak (barang persediaan konsumsi) pada modul komitmen yang seharusnya bertanggal 1 Juli 2026 namun terinputkan tanggal 30 Juni 2026. Atas kesalahan tersebut, telah membentuk persediaan pada tanggal 30 Juni 2026, dikarenakan perbaikan dilakukan pada bulan Juli 2026, maka jurnal balik terbentuk secara otomatis oleh sistem pada bulan Juli 2026.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp225.829.452.188,00 dan Rp228.290.786.140,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2.461.333.952,00 atau 1,08% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Tanah	155.787.621.000	155.787.621.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	22.644.926.101	22.644.926.101	0	0
3	Gedung dan Bangunan	54.231.565.743	54.231.565.743	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.440.123.361	27.440.123.361	0	0
5	Akumulasi Penyusutan	(34.274.784.017)	(31.813.450.065)	(2.461.333.952)	7,74
Jumlah		225.829.452.188	228.290.786.140	(2.461.333.952)	1,08

C.7. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp155.787.621.000,00 dan Rp155.787.621.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2025	155.787.621.000
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2026	155.787.621.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah menurut Eselon I di BPTU HPT Padang Mengatas disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.2. Rincian Tanah

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.800.000 m2	BPTU HPT Padang Mengatas, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	142.352.941.000
2	2.340.000 m2	Desa Margoyoso, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Jambi	13.434.680.000
Jumlah			155.787.621.000

C.8. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp22.644.926.101,00 dan Rp22.644.926.101,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	22.644.926.101
B	Mutasi Tambah	0
	Pembelian	0
C	Mutasi Kurang	0
		0
D	Saldo Peralatan Mesin 30 Juni 2026	22.644.926.101

Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin di BPTU HPT Padang Mengatas disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.2 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin

No.	Eselon I	Nilai
		0
	Jumlah	0

C.9. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp54.231.565.743,00 dan Rp54.231.565.743,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	54.231.565.743
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Gedung Bangunan 30 Juni 2026	54.231.565.743

C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp27.440.123.361,00 dan Rp27.440.123.361,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	27.440.123.361
B	Mutasi Tambah	0
C	Total Mutasi Kurang	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 30 Juni 2026	27.440.123.361

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp34.274.784.017,00 dan Rp27.243.940.466,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2.461.333.952 atau 7,74% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% Naik Turun
1	Peralatan dan Mesin	(16.316.999.434)	(15.489.012.881)	(827.986.553)	5,35
2	Gedung dan Bangunan	(8.365.512.796)	(7.762.951.977)	(602.560.819)	7,76
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.592.271.787)	(8.561.485.207)	(1.030.786.580)	12,04
	Jumlah	(34.274.784.017)	(31.813.450.065)	(2.461.333.952)	7,74

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.487.396.630,00 dan Rp2.527.753.595,00. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan senilai Rp40.356.965,00 atau 1,60% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% Naik Turun
1	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	3.345.719.500	3.345.719.500	0	0
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(858.322.870)	(817.965.905)	(40.356.965)	4,93
Jumlah		2.527.753.595	2.527.753.595	(40.356.965)	3,41

C.13. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025.

C.14. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.345.719.500,00 dan Rp3.345.719.500,00. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1 Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Klasifikasi		Jenis	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Peralatan dan Mesin	Kursi dorong 2 unit	2.400.000	2.400.000	0
			Mesin Gergaji Logam 1 buah	10.000.000	10.000.000	0
			Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya 1 unit	60.500.000	60.500.000	0
			Televisi 2 buah	11.935.000	11.935.000	0
			Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	6.128.000	6.128.000	0
			Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	2.400.000	2.400.000	0
			Kursi Dorong	22.964.000	22.964.000	0
			Microscope	60.000.000	60.000.000	0
		Gedung dan Bangunan	Gedung Pos Jaga Permanen	255.339.000	255.339.000	0

No.	Klasifikasi		Jenis	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
			Bangunan Lantai Jemur Permanen	2.912.283.000	2.912.283.000	0
			Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	11.935.000	11.935.000	0
Total				3.345.719.500	3.345.719.500	0

C.15. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp-858.322.870,00 dan Rp-817.965.905,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan Rp40.356.965,00 atau 4,93% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% Naik Turun
1	Aset Lain-Lain	Peralatan dan Mesin	(858.322.870)	(817.965.905)	40.356.965	4,93
Total			(858.322.870)	(817.965.905)	40.356.965	4,93

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.370.951.558,00 dan Rp52.739.551,00,00. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2.318.212.007,00 atau 4.395,59% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.370.951.558,00 dan Rp52.739.551,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2.318.212.007,00 atau

4.395,58% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Utang kepada Pihak Ketiga	1.654.629.574	52.739.551	1.601.890.023	3.037,36
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	391.321.984	0	391.321.984	0
3	Uang Muka Dari KPPN	325.000.000	0	325.000.000	0
Jumlah		2.370.951.558	52.739.551	2.318.212.007	4.395,58

C.16. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.654.629.574,00 dan Rp52.739.551,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.601.890.023,00 atau 3.037,36% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	414.231.280	31.092.942	383.138.338	1.232,24
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	1.227.347.294	21.646.609	1.205.700.685	5.569,93
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	13.051.000	0	13.051.000	0
Jumlah		1.654.629.574	52.739.551	1.601.890.023	3.037,36

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan gaji PNS bulan Juli 2026 senilai Rp331.255.112,00 dan gaji PPPK senilai Rp 64.711.168,00, Uang Lembur dan Uang Makan PNS bulan Juni sebesar Rp15.719.000,00, Uang Lembur dan Uang Makan PPPK bulan Juni sebesar Rp2.546.000,00
2. Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan belanja yang kuitansi/BAST tertanggal Juni namun pertanggungjawaban keuangannya pada bulan Juli 2026.
3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan saldo UP KKP yang masih ada dalam saldo bank bendahara pengeluaran dan akan dibayarkan pada bulan Juli 2026.

C.17. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp391.321.984,00 dan Rp0,00. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp391.321.984,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Utang yang belum ditagihkan	391.321.984	0	391.321.984	100
	Jumlah	391.321.984	0	391.321.984	100

Utang yang belum ditagihkan merupakan belanja barang yang kuitansi/BAST tertanggal Juni namun pertanggungjawaban keuangannya pada bulan Juli 2026, dengan rincian sebagai berikut:

- BAST No. 1046/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 26 Juni 2026 Pembelian Eartag Rp17.835.000,00
- BAST No. 1048/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 26 Juni 2026 Pembelian Apron Rp5.940.000
- BAST No. 1088/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 30 Juni 2026 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas PNS Rp48.990.000
- BAST No. 1090/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 30 Juni 2026 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas PPPK Rp13.490.000
- BAST No. 1092/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 30 Juni 2026 Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan p47.360.000
- BAST No. 845 /PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 2 Juni 2026 Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Dinding Penahan Tanah (Turap) Parkiran Jalan Breeding Center Rp198.996.984
- BAST No. 958/PL.020/F2.G/6/2026 tanggal 17 Juni 2026 Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air Taman Mess Bung Hatta Rp49.987.000
- Kuitansi UP atas belanja barang Rp8.723.000,00 tanggal 30 Juni 2026 yang belum di SPJ kan

C.18. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp325.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 yang disajikan merupakan saldo UP Per 30 Juni 2026 yang dikelola pada BPTU HPT Padang Mengatas.

C.19. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp251.250.927.873,00 dan Rp245.217.455.682,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp6.033.472.191,00 atau 2,46% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 30 Juni 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	1.447.807.030	1.069.182.881
Beban Operasional	15.707.754.271	14.450.200.297
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(14.259.947.241)	(13.381.017.416)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.447.807.030,00 dan Rp1.069.182.881,00.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.447.807.030,00 dan Rp1.069.182.881,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp378.624.149,00 atau 35,41% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester I TA 2026 di LRA disajikan sebesar Rp1.556.502.934,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 di LO disajikan sebesar Rp1.447.807.030,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp108.695.904,00.

Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel D.1.1 Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.360.660.000	1.051.635.500	309.024.500	29,39
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.700.000	(1.700.000)	(100)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.761.901	15.847.381	56.914.520	359,14
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	14.385.000	0	14.385.000	0

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	129	0	129	0
Jumlah	1.447.807.030	1.069.182.881	378.624.149	35,41

Perbandingan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.360.660.000	1.360.660.000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.446.419	72.761.901	315.482
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.948.000	0	6.948.000
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	4.538.000	0	4.538.000
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	14.385.000	14.385.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	97.525.515	0	97.525.515
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		129	(129)
Jumlah	1.556.502.934	1.447.807.030	108.695.904

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya di LRA dengan nilai di LO sebesar Rp108.695.904,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi merupakan sewa rumah dinas pada potongan SPM Gaji Juli 2026, dimana SPMnya tertanggal pada bulan Juni namun SP2D nya tertanggal dibulan Juli 2026.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan hasil lelang BMN
3. Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III merupakan sewa bangunan dari Koperasi.
4. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu merupakan Kelebihan Pembayaran Pek. Pemb. Breeding Center Sapi Potong Indonesia oleh PT.Suryamanunggal Wisesa.
5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) merupakan saldo jasa giro yang diberikan oleh bank sebagai jasa bagi hasil.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp15.707.754.271,00 dan Rp14.450.200.297,00. Nilai Beban Operasional Per 30 Juni

2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.257.553.974,00 atau 8,70% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.916.276.004,00 dan Rp3.388.501.708,00. Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp527.774.296,00 atau 15,58% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Beban Gaji Pokok PNS	2.269.313.400	2.244.085.400	25.228.000	1,12
Beban Pembulatan Gaji PNS	-5.586	-20	(5.566)	27,830
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	32.991	31.137	1.854	5,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	194.414.770	204.745.980	(10.331.210)	(5,05)
Beban Tunj. Anak PNS	66.326.026	66.902.866	(576.840)	(0,86)
Beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000	16.965.000	(765.000)	(4,51)
Beban Tunj. Fungsional PNS	184.032.000	204.792.000	(20.760.000)	(10,14)
Beban Tunj. PPh PNS	21.904.987	24.568.535	(2.663.548)	(10,84)
Beban Tunj. Beras PNS	151.502.640	152.226.840	(724.200)	(0,48)
Beban Uang Makan PNS	211.060.000	208.480.000	2.580.000	1,24
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	62.110.000	54.875.000	7.235.000	13,18
Beban Tunjangan Umum PNS	-1.080.000	0	(1.080.000)	0
Beban Gaji Pokok PPPK	439.876.138	153.541.663	286.334.475	186,49
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.376	3.695	6.681	180,81
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	41.157.757	14.366.387	26.791.370	186,49
Beban Tunjangan Anak PPPK	14.121.893	4.929.333	9.192.560	186,49
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.830.000	2.035.000	3.795.000	186,49
Beban Tunjangan Beras PPPK	43.500.280	15.184.060	28.316.220	186,49
Beban Uang Makan PPPK	59.582.000	11.303.000	48.279.000	427,13
Beban Tunjangan Umum PPPK	27.118.332	9.465.832	17.652.500	186,49
Beban Uang Lembur	95.063.000	0	95.063.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	14.205.000	0	14.205.000	0
Jumlah	3.916.276.004	3.388.501.708	527.774.296	15,58

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Beban/belanja Tunj. Beras PNS	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/belanja Gaji Pokok PNS	2.019.344.900	2.269.313.400	(249.968.500)
Pengembalian Beban/belanja Pembulatan Gaji PNS	-5.586	-5.586	-
Beban/belanja Pembulatan Gaji PNS	29.959	32.991	(3.032)
Beban/belanja Tunj. Suami/Istri PNS	173.142.960	194.414.770	(21.271.810)

Beban/belanja Tunj. Beras PNS	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/belanja Tunj. Anak PNS	58.953.976	66.326.026	(7.372.050)
Beban/belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000	16.200.000	(1.800.000)
Beban/belanja Tunj. Fungsional PNS	163.534.000	184.032.000	(20.498.000)
Beban/belanja Tunj. PPh PNS	21.838.809	21.904.987	(66.178)
Beban/belanja Tunj. Beras PNS	134.846.040	151.502.640	(16.656.600)
Beban/belanja Uang Makan PNS	234.439.000	211.060.000	23.379.000
Beban/belanja Tunjangan Umum PNS	56.065.000	62.110.000	(6.045.000)
Pengembalian Beban/belanja Tunjangan Umum PNS	-1.080.000	-1.080.000	-
Beban/belanja Gaji Pokok PPPK	390.078.838	439.876.138	(49.797.300)
Beban/belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.144	10.376	(1.232)
Beban/belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	36.498.387	41.157.757	(4.659.370)
Beban/belanja Tunjangan Anak PPPK	12.523.187	14.121.893	(1.598.706)
Beban/belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.170.000	5.830.000	(660.000)
Beban/belanja Tunjangan Beras PPPK	38.575.720	43.500.280	(4.924.560)
Beban/belanja Uang Makan PPPK	59.722.000	59.582.000	140.000
Beban/belanja Tunjangan Umum PPPK	24.048.332	27.118.332	(3.070.000)
Beban/belanja Uang Lembur PNS	79.344.000	95.063.000	(15.719.000)
Beban/belanja Uang Lembur PPPK	11.659.000	14.205.000	(2.546.000)
Jumlah	3.533.137.666	3.916.276.004	(383.138.338)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp383.138.338,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Adanya SPM Pembayaran Belanja Gaji PNS bulan Juli sebesar Rp331.255.112,00.
- Adanya SPM Pembayaran Belanja Gaji PPPK bulan Juli sebesar Rp 64.711.168,00.
- Adanya SPM Pembayaran Belanja Uang Lembur dan Uang Makan PNS bulan Juni sebesar Rp15.719.000,00.
- Adanya SPM Pembayaran Belanja Uang Lembur dan Uang Makan PPPK bulan Juni sebesar Rp2.546.000,00.
- Adanya SPM Pembayaran Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp23.379.000,00.
- Adanya SPM Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp140.000,00.
- Adanya SPM gaji terusan ke 4 Tahun 2025 sebesar Rp6.024.590,00.
- Adanya SPM Kekurangan Gaji bulan Desember 2025 sebesar Rp216.152
- Adanya SPM Kekurangan Gaji bulan April, Agustus, November dan Desember 2025 sebesar Rp1.333.200,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.515.935.260,00 dan Rp1.751.210.250,00. Nilai Beban Persediaan Per 30 Juni 2026

mengalami kenaikan sebesar Rp1.764.725.010,00 atau 100,77% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2025.

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Beban Persediaan konsumsi	3.297.401.511	1.540.153.250	1.757.248.261	114,10
Beban Persediaan bahan baku	175.920.000	165.055.750	10.864.250	6,58
Beban persediaan lainnya	42.613.749	46.001.250	(3.387.501)	(7,36)
Jumlah	3.515.935.260	1.751.210.250	1.764.725.010	100,77

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Persediaan konsumsi	2.941.718.800	3.297.401.511	(355.682.711)
Belanja/Beban Persediaan bahan baku	4.797.000	175.920.000	(171.123.000)
Belanja/Beban persediaan lainnya	0	42.613.749	(42.613.749)
Jumlah	2.946.515.800	3.515.935.260	(569.419.460)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp569.419.460,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.3.3 Mutasi Persediaan Sebagai Pembanding LRA dan LO Per 30 Juni 2026

Uraian Persediaan	Saldo Awal	Mutasi Tambah			
		Pembelian	Transfer Masuk	Koreksi	Perolehan Lainnya
Barang Konsumsi	210.974.808	4.051.823.800			-
Bahan Baku	2.202.502.400	4.797.000			-
Persediaan Lainnya	12.038.178.290	0	79.462.964	9.268.500.000	2.031.000.000
Total	14.451.655.498	4.056.620.800	79.462.964	9.268.500.000	2.031.000.000

Uraian Persediaan	Mutasi Kurang				Saldo Akhir
	Habis Pakai	Koreksi	Keluar Lainnya	Transfer Keluar	
Barang Konsumsi	(3.297.401.511)	-	-	-	965.397.097
Bahan Baku	(175.920.000)	-	-	-	2.031.379.400
Persediaan Lainnya	(42.613.749)	-	(1.337.000.000)	(115.000.000)	21.922.527.505
Total	(3.515.935.260)	-	(1.337.000.000)	(115.000.000)	24.919.304.002

Belanja persediaan tidak dapat dibandingkan langsung dengan beban persediaan, belanja persediaan pada LRA dapat dibandingkan dengan jumlah transaksi pembelian, sedangkan

beban persediaan pada Laporan Operasional merupakan hasil dari transaksi habis pakai dari modul persediaan.

- Nilai belanja barang persediaan dibandingkan dengan jumlah transaksi pembelian, dimana nilai belanjanya Rp2.941.718.800,00, dicatat sebagai transaksi pembelian pada modul persediaan senilai Rp4.056.620.800,00. Selisihnya dikarenakan adanya pembayaran termyn III pengadaan bahan pakan/pakan sapi potong dewasa dengan BAPP 29 Juni 2026 namun SP2D tertanggal 2 Juli 2026 senilai Rp1.110.105.000.

Tabel D.3.4 Perbandingan Nilai belanja barang persediaan pada LRA dengan jumlah transaksi pembelian

Uraian	LRA (Rp)	Transaksi Pembelian (Rp)	Selisih (Rp)
Transaksi Pembelian			
Barang Konsumsi	2.941.718.800	4.051.823.800	(1.110.105.000)
Bahan Baku	4.797.000	4.797.000	0
Jumlah	2.946.515.800	4.056.620.800	(1.110.105.000)

Mutasi tambah lainnya berasal dari:

- Perolehan lainnya berupa ternak sapi yang baru lahir senilai Rp2.031.000.000,00
- Transfer masuk berupa Vaksin PMK Aphthovet 2026, vitamin, obat dan antibiotik dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp79.462.964
- Koreksi Penambahan Nilai Sapi senilai Rp9.268.500.000, dan koreksi penyesuaian nilai persediaan senilai Rp54.395.145.
- Beban persediaan pada Laporan Operasional merupakan hasil dari transaksi habis pakai dari modul persediaan. Nilai mutasi kurang Rp3.515.935.260,00 dan nilai beban persediaan pada Laporan Operasional sebesar Rp3.515.935.260,00, sehingga tidak terdapat terdapat selisih.

Tabel D.3.5 Perbandingan beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang pada persediaan

Uraian	LO (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Selisih (Rp)
Mutasi Kurang			
Barang Konsumsi	3.297.401.511	3.297.401.511	0
Bahan Baku	175.920.000	175.920.000	0
Persediaan lainnya	42.613.749	42.613.749	0
Jumlah	3.515.935.260	3.515.935.260	0

Mutasi kurang lainnya berasal dari

- Koreksi penyesuaian nilai persediaan senilai Rp54.395.145
- Tranfer Keluar berupa ternak sapi ke BBIB Singosari, BBIB Lembang, BET Cipelang senilai Rp115.000.000
- Keluar lainnya berupa sapi mati senilai Rp1.337.000.000

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan awal tahun dikurangi Persediaan akhir tahun ditambah (dikurangi) koreksi penyesuaian. Oleh karena itu, maka:

Tabel D.3.6 beban persediaan pada LO

Uraian	Nilai (Rp)	Ket
Beban Persediaan (LO)	3.515.935.260	
Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)	2.946.515.800	
Saldo Persediaan awal tahun	14.451.655.498	
Saldo Persediaan akhir tahun	24.919.304.002	
Jumlah	(7.521.132.704)	Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Saldo Persediaan awal tahun - Saldo Persediaan akhir tahun
Koreksi penyesuaian	9.268.500.000	
Selisih	1.768.567.964	Beban Persediaan (LO)- Jumlah-Koreksi Penyesuaian

Terdapat mutasi tambah lainnya berupa transfer masuk dan perolehan lainnya senilai Rp2.110.462.964, dan transfer keluar lainnya senilai Rp1.452.000.000, juga terdapat persediaan dg BAST juni namun pembayaran Juli senilai Rp1.110.105.000, dengan demikian selisih $1.768.567.964 = \text{Rp}2.110.462.964 - \text{Rp}1.452.000.000 + \text{Rp}1.110.105.000$

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.666.974.442,00 dan Rp2.774.515.587,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp107.541.145,00 atau 3,88% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/turun
Beban Barang				
Beban Keperluan Perkantoran	597.068.547	698.936.669	(101.868.122)	(14,57)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.455.300	62.920.000	(17.464.700)	(27,76)
Beban Pengiriman SuratDinas Pos Pusat	1.870.288	439.300	1.430.988	325,74
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.550.000	51.760.000	(1.210.000)	(2,34)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.360.637.000	210.047.000	1.150.590.000	547,78
Beban Bahan	391.544.500	248.105.000	143.439.500	57,81
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1.305.246.000	(1.305.246.000)	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	26.700.000	0		

Beban Jasa			-	
Beban Langganan Listrik	61.985.207	50.072.618	11.912.589	23,79
Beban Langganan Dayadan Jasa Lainnya	52.614.000	29.489.000	23.125.000	78,42
Beban Jasa Konsultan	45.470.600	0	45.470.600	
Beban Sewa	30.849.000	0	30.849.000	
Beban Jasa Lainnya	2.230.000	117.500.000	(115.270.000)	(98,10)
Jumlah	2.666.974.442	2.774.515.587	(107.541.145)	(3,88)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Keperluan Perkantoran	479.982.253	597.068.547	(117.086.294)
Belanja/Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.455.300	45.455.300	-
Belanja/Beban Pengiriman SuratDinas Pos Pusat	1.870.288	1.870.288	-
Belanja/Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.550.000	50.550.000	-
Belanja/Beban Barang Operasional Lainnya	1.360.637.000	1.360.637.000	-
Belanja/Beban Bahan	367.354.500	391.544.500	(24.190.000)
Belanja/Beban Honor Output Kegiatan	26.700.000	26.700.000	-
Belanja/Beban Jasa			-
Belanja/Beban Langganan Listrik	72753816	61.985.207	10.768.609
Belanja/Beban Langganan Dayadan Jasa Lainnya	63492000	52.614.000	10.878.000
Belanja/Beban Jasa Konsultan	45.470.600	45.470.600	-
Belanja/Beban Sewa	30.849.000	30.849.000	-
Belanja/Beban Jasa Lainnya	2.230.000	2.230.000	-
Jumlah	2.547.344.757	2.666.974.442	(119.629.685)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp119.629.685,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Terdapat perbedaan antara biaya keperluan perkantoran antara beban dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya gaji PPPK paruh waktu bulan Juni yang SP2Dnya terbit pada tanggal 1 Juli 2026 senilai Rp28.481.662,00, pembayaran baju dinas pegawai dengan BAST 30 juni 2026 senilai Rp62.480.000,00 namun SP2D terbit pada tanggal 10 Juli 2026, pembayaran termyn III Jasa Pramubakti senilai Rp26.124.632 dengan BAPP 29 Juni 2026 namun SP2D tanggal 2 Juli 2026.
- Terdapat perbedaan antara biaya bahan antara beban dan realisasinya senilai Rp24.190.000, terdiri dari belanja pembelian eartag dengan BAST 26 juni 2026 senilai Rp17.835.000,00 namun SP2D terbit pada Juli 2026, belanja pembelian apron dengan BAST 26 juni 2026 senilai Rp5.940.000,00 namun SP2D terbit pada Juli 2026, kuitansi UP bulan Juni 2026 yang belum dilakukan pertanggungjawaban keuangannya senilai Rp415.000.
- Terdapat perbedaan antara biaya langganan listrik antara beban dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya tambahan beban atas pemakaian listrik pada bulan Desember 2025 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2026 senilai Rp10.768.609,00

- Terdapat perbedaan antara biaya daya dan jasa lainnya antara beban dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya tambahan beban atas pemakaian daya dan jasa lainnya (internet) pada bulan Desember 2025 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2026 senilai Rp10.878.000,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.848.178.639,00 dan Rp3.752.743.100,00. Nilai Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp904.564.461,00 atau 24,10% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp2.534.758.655,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp2.848.178.639,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.5.1 Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.324.696.292	1.695.480.000	(370.783.708)	(21,87)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	928.551.782	1.457.263.100	(528.711.318)	(36,28)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	594.930.565	600.000.000	(5.069.435)	(0,84)
Jumlah	2.848.178.639	3.752.743.100	(904.564.461)	(24,10)

Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.225.709.292	1.324.696.292	(98.987.000)
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	913.115.782	928.551.782	(15.436.000)
Belanja/Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	395.933.581	594.930.565	(198.996.984)
Jumlah	2.534.758.655	2.848.178.639	(313.419.984)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar Rp313.419.984,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp98.987.000,00 merupakan pekerjaan pemeliharaan kandang showroom senilai Rp9.000.000,00 dengan BAST 11 Mei 2026 namun SP2D 2 Juli 2026, pekerjaan pemeliharaan atap gudang silase semi permanen senilai Rp40.000.000 dengan BAST 29 Juni 2026 namun SP2D 2 Juli 2026, pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air Taman Mess Bung Hatta senilai Rp49.987.000 dengan BAST 17 Juni 2026 namun SP2D pada bulan Juli 2026.
- Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp15.436.000 merupakan kuitansi uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan pada bulan Juni 2026 senilai Rp1.800.000,00 dan pekerjaan pemeliharaan drone dengan BAST 26 juni 2026 namun SP2D 3 Juli 2026 senilai Rp13.636.000,00
- Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp198.996.984,00, merupakan pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Dinding Penahan Tanah (Turap) Parkiran Jalan Breeding Center dengan BAST 2 Juni 2026 namun SP2D tanggal 10 Juli 2026

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp258.699.009,00 dan Rp92.445.111,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp166.253.898,00 atau 179,84% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp252.191.009,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih kecil sebesar Rp258.699.009,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6.1 Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/turun
Beban Perjalanan Dinas Biasa	258.699.009	92.445.111	166.253.898	179,84
Jumlah	258.699.009	92.445.111	166.253.898	179,84

Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6.2 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/beban Perjalanan Dinas Biasa	252.191.009	258.699.009	6.508.000
Jumlah	252.191.009	258.699.009	6.508.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO senilai Rp6.508.000,00 merupakan kuitansi uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan pada bulan Juni 2026.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.501.690.917,00 dan Rp2.690.784.541,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp189.093.624,00 atau 7,03% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Uraian		Per 30 Juni 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	& Naik turun
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	827.986.553	823.456.367	4.530.186	0,55
		Gedung dan Bangunan	602.560.819	672.798.471	-70.237.652	(10,44)

No.	Uraian	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	& Naik turun
	Jalan dan Jembatan	930.015.386	1.063.409.509	-133.394.123	(12,54)
	Irigasi	88.753.710	119.102.710	-30.349.000	(25,48)
	Jaringan	12.017.484	12.017.484	0	
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opr Pemerintah	40.356.965	0	40.356.965	0
	Jumlah	2.501.690.917	2.690.784.541	189.093.624	(7,03)
	Total	2.501.690.917	2.690.784.541	189.093.624	(7,03)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional BPTU HPT Padang Mengatas Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-1.325.514.000	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.128.525.515	940.705.960
Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional	803.011.515	940.705.960

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp-1.325.514.000,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1.325.514.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp11.486.000,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan Rp11.486.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 sebesar Rp11.486.000,00 merupakan:

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berasal dari hasil lelang BMN senilai Rp6.948.000,00. Pendapatan ini merupakan hasil lelang dari Tugu/ Tanda Batas Administrasi Desa dengan nilai perolehan aset Rp2.912.283.000,00 dengan Nomor risalah lelang 57/03.02/2026-01 tanggal 5 Mei 2026 sedangkan SK Penghapusan masih sedang dalam proses.
- Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III berasal dari sewa bangunan dari Koperasi senilai Rp4.538.000,00

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.337.000.000,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.337.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.128.525.515,00 dan Rp940.705.960,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.187.819.555,00 atau 126,27% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.128.525.515,00 dan Rp940.705.960,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.187.819.555,00 atau 126,27% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026

No.	Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	75.000	(75.000)
2	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	97.525.515	9.630.960	87.894.555
3	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.031.000.000	931.000.000	1.100.000.000
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah		2.128.525.515	940.705.960	1.187.819.555

- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu merupakan Kelebihan Pembayaran Pek. Pemb. Breeding Center Sapi Potong Indonesia oleh PT.Suryamanunggal Wisesa.
- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya berasal dari ternak turunan.

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.12.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026

No.	Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Per 30 Juni 2026, BPTU HPT Padang Mengatas mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp803.011.515,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp137.694.445,00 atau 14,64% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp940.705.960,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.13. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025.

D.14. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.15. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Per 30 Juni 2026, BPTU HPT Padang Mengatas mengalami Defisit LO sebesar Rp-13.456.935.726,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.016.624.270,00 atau 8,17% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar 12.440.311.456,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp245.217.455.682,00 dan Rp244.157.132.794,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.322.888,00 atau 0,43% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp-13.456.935.726,00 dan Rp-12.440.311.456,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.016.624.270,00 atau 8,17% apabila dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp9.268.500.000,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode

yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp11.813.947.887,00 dan Rp14.734.231.622,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2.920.283.735,00 atau 19,82% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.556.502.934,00 dan Rp1.078.542.706,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp477.960.228,00 atau 44,32% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BPTU HPT Padang Mengatas, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp115.000.000,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp115.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel E.4.3.1 Daftar Transfer Keluar

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Ternak Sapi	BBIB Singosari	60.000.000
Ternak Sapi	BIB Lembang	22.000.000

Ternak Sapi	BET Cipelang	33.000.000
Jumlah		115.000.000

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp79.462.964,00 dan Rp18.000.000,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp61.462.964,00 atau 341,46% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Tabel E.4.4.1 Daftar Transfer Masuk

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Vaksin PMK , vitamin, obat, antibiotik	Ditjen PKH	79.462.964
Jumlah		79.462.964

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Per 30 Juni 2026, BPTU HPT Padang Mengatas mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp6.033.472.191,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp4.800.094.731,00 atau 389.18% apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp1.233.377.460,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp251.250.927.873,00 dan Rp245.390.510.254,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp5.860.417.619,00 atau 2,39% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Pengelola Keuangan

Daftar pengelola keuangan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Padang Mengatas per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Nama/ NIP	Jabatan
Farouk Mochtar, S.Pt, MP NIP.197504232002121001	Kuasa Pengguna Anggaran
Al Hendri, S.Pt, M.Si NIP.198407092009011004	Pejabat Penandatanganan SPM
Afandri, SP NIP.198705102019021001	PPK Reguler
Dika Muharam, S.Pt NIP.198609062014031003	PPK Banpem
Desi Fitria, SM NIP.198008282005012020	Bendahara Pengeluaran
Adek Suryanto, A.Md NIP.197601081997031001	Bendahara Penerimaan
Fikra Salsabila Irwan, SE NIP. 199604262020122006	Petugas BMN
Vinni Vindriani NIP.199404272014032001	Petugas GLP

F.2 Capaian Output

Data capaian output Tahun 2026

No	Keg KRO/ RO Uraian	Pagu	Realisasi	%	Keluaran				Keterangan
					Targ et	Satua n	RV RO	PCRO (%)	
1	1785 PDA 002 Standarisasi Bibit Ternak Unggul	1.713.035.000	635.044.322	37,07	252	produ k	0	50	Kegiatan Bibit Ternak Unggul dalam pelaksanaan
2	1785 QEO 004 Bantuan Ternak Unggas	4.396.996.000	42.827.700	0,97	13.200	ekor	0	5	Kegiatan Bantuan Ternak Unggas dalam pelaksanaan, telah dilakukan pelaksanaan kontrak kegiatan dengan penyedia
3	1785 QEO 003 Bantuan Ternak Ruminansia Potong	1.169.112.000	16.422.887	1,40	240	ekor	0	5	Kegiatan Bantuan Ternak Ruminansia Potong dalam tahap perencanaan kegiatan
4	1787 EBA 994 Layanan Perkantoran	30.371.054.000	11.119.152.978	36,61	1	Laya nan	0	50	Kegiatan Layanan Perkantoran dalam pelaksanaan, Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
5	1787 EBD Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah	365.000	0	0	3	Reko mend asi	0	50	Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah dalam pelaksanaan
6	1787 EBD Z27 Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Propinsi	652.000	500.000	76,69	1	Laya nan	6	50	Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah dalam pelaksanaan

F.3 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada BPTU HPT Padang Mengatas terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dengan Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Standarisasi Bibit Ternak Unggul	1.713.035.000	635.044.322	37,07	Produk	252	-	50
Bantuan Ternak Unggas	4.396.996.000	42.827.700	0,97	Ekor	13.200	-	5
Bantuan Ternak Ruminansia Potong	1.169.112.000	16.422.887	1,40	Ekor	240	-	5

F.4 Informasi Pagu Blokir

Data pagu blokir sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Blokir
1	51 Belanja Pegawai	6.422.022.000	
2	52 Belanja Barang	31.229.189.000	35.206.000
	Jumlah	37.651.211.000	35.206.000

F.5 Bantuan Pemerintah

Telah dilakukan pembuatan kontrak kegiatan dengan penyedia terkait kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2026, diantaranya:

- Pekerjaan Pengadaan Paket Kandang Ayam Petelur (Kandang, Tempat Pakan, Minum dan Pemasangan) dengan CV. Khanda Bersama, Surat Pesanan Nomor EP-01KSQ4C81KKVKGRR9QXK792WWZ tanggal 29 Mei 2026 senilai Rp290.399.998
- Pekerjaan Pengadaan Ternak Ayam Pullet / Petelur dengan CV. Ghanem Jaya, Surat Pesanan Nomor EP-01KSQ4QQXP7NMZY54459E5DEDR tanggal 29 Mei 2026 senilai Rp264.000.000
- Pekerjaan Pengadaan Pakan Ayam 522 dengan CV. Ghanem Jaya, Surat Pesanan Nomor EP-01KSWJDDGGZ5KQBV6FN90QK9N6 tanggal 30 Mei 2026 senilai Rp205.200.000
- Pekerjaan Pengadaan Ternak Ayam Pullet / Petelur Tahap II Sumatera Barat dengan CV. Ghanem Jaya, Surat Pesanan Nomor EP-01KW8NXCMP1B063BDAT6127RJK tanggal 29 Mei 2026 senilai Rp523.200.000
- Pekerjaan Pengadaan Paket Kandang Ayam Petelur (Kandang, Tempat Pakan, Minum dan Pemasangan) Tahap II Sumatera Barat dengan CV. Khanda Bersama, Surat Pesanan Nomor EP-01KW96JX8WQMDDM9CT9TNS5ST7 tanggal 30 Mei senilai Rp579.999.997
- Pekerjaan Pengadaan Pakan Ayam 522 Tahap II Sumatera Barat dengan CV. Ghanem Jaya, Surat Pesanan Nomor EP-01KWA3FHS2VZESDWA0QX9WTD4 tanggal 30 Mei senilai Rp401.760.000

Realisasi fisik dan keuangan kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2026:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Bantuan Ternak Unggas					
1	Pengadaan Ayam pullet petelur umur minimal 16 minggu di Provinsi Sumatera Barat	264.000.000	0	2.400 ekor	-
2	Pengadaan Pakan selama 3 bulan di Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	205.200.000	0	21.600 kg	-
3	Pengadaan Obat, Vitamin dan Vaksin di Provinsi Sumatera Barat	13.600.000	0	4 paket	-
4	Paket lengkap kandang, tempat pakan, minum/nipple dan instalasi minggu di Provinsi Sumatera Barat	290.400.000	0	4 unit	-
Bantuan Ternak Unggas Tambahan					
1	Pengadaan Ayam pullet petelur umur 16 minggu di Provinsi Sumatera Barat	1.188.000.000	0	10.800 ekor	-
2	Pengadaan Pakan selama 3 bulan di Provinsi Sumatera Barat	1.020.600.000	0	97.200 kg	-
3	Pengadaan Obat, Vitamin dan Vaksin di Provinsi Sumatera Barat	54.000.000	0	18 paket	-
4	Paket lengkap kandang, tempat pakan, minum/nipple dan instalasi minggu di Provinsi Sumatera Barat	1.206.000.000	0	18 unit	-
Bantuan Ternak Ruminansia					
1	Pengadaan Kambing/Domba	912.000.000	0	240 ekor	
2	Vitamin dan Obat	24.000.000	0	240 dosis	
3	Bantuan kandang	165.912.000	0	24 kelompok	
	Jumlah	8.829.240.000	0		

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
 UNIT ORGANISASI : 06
 WILAYAH/PROVINSI : 0800
 SATUAN KERJA : 239434

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 SUMATERA BARAT
 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG
 MENGATAS

Tgl. Cetak 14/07/2026 9:00 PM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	210,974,808	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,202,502,400	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	12,038,178,290	0
0.0	131111	Tanah	155,787,621,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	22,644,926,101	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	54,231,565,743	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	21,993,112,254	0
0.0	134112	Irigasi	4,725,962,107	0
0.0	134113	Jaringan	721,049,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,489,012,881
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,762,951,977
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,910,908,252
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,272,075,470
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	378,501,485
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,345,719,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	817,965,905
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	31,092,942
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	21,646,609
0.0	391111	Ekuitas	0	245,217,455,682
JUMLAH			277,901,611,203	277,901,611,203

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	11,813,947,887
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,556,502,934	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,360,660,000
3.0	425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	0	4,538,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,948,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,446,419
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	14,385,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	97,525,515
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,019,344,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,959	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	173,142,960	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	58,953,976	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	163,534,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,838,809	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	134,846,040	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	234,439,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,065,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	390,078,838	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,144	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	36,498,387	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,523,187	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,170,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38,575,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	59,722,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	24,048,332	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	79,344,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	11,659,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	479,982,253	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,455,300	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,870,288	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,550,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,360,637,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	367,354,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26,700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,941,718,800	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	4,797,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	72,753,816	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	63,492,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	45,470,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	30,849,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,230,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,225,709,292	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	913,115,782	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	395,933,581	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	252,191,009	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	5,586
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,080,000
JUMLAH			13,371,536,407	13,371,536,407

Keterangan :

FINAL

Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



FAROUK MOCHTAR, S.PT, MP

197504232002121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	325,000,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	129	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	13,051,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	315,482	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	965,397,097	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,031,379,400	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	21,922,527,505	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	47,360,000	0
0.0	131111	Tanah	155,787,621,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	22,644,926,101	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	54,231,565,743	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	21,993,112,254	0
0.0	134112	Irigasi	4,725,962,107	0
0.0	134113	Jaringan	721,049,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	16,316,999,434
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,365,512,796
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	7,840,923,638
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,360,829,180
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	390,518,969
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,345,719,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	858,322,870
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	414,231,280
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,227,347,294
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	13,051,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	391,321,984
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	325,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,813,947,887
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,556,502,934	0
0.0	313211	Transfer Keluar	115,000,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	79,462,964
0.0	391111	Ekuitas	0	245,217,455,682
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	9,268,500,000
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,360,660,000
3.0	425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	0	4,538,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,948,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,761,901
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	14,385,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	129
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	97,525,515
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2,031,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,269,313,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	27,405	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	194,414,770	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	66,326,026	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	184,032,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	21,904,987	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	151,502,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	211,060,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	61,030,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	439,876,138	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,376	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	41,157,757	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	14,121,893	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,830,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	43,500,280	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	59,582,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	27,118,332	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	95,063,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	14,205,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	597,068,547	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45,455,300	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,870,288	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,550,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,360,637,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	391,544,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	26,700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	61,985,207	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	52,614,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	45,470,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	30,849,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,230,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,324,696,292	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	928,551,782	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	594,930,565	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	258,699,009	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	827,986,553	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	602,560,819	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	930,015,386	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	88,753,710	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	12,017,484	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	40,356,965	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,297,401,511	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	175,920,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	42,613,749	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,337,000,000	0
JUMLAH			307,471,243,523	307,471,243,523

Keterangan :

FINAL

Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

FAROUK MOCHTAR, S.PT, MP
197504232002121001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	325,000,000	0	325,000,000	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	129	0	129	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	13,051,000	0	13,051,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	315,482	0	315,482	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	315,482	0	315,482	0.00
Persediaan	24,919,304,002	14,451,655,498	10,467,648,504	72.43
Persediaan yang Belum Diregister	47,360,000	0	47,360,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	25,305,030,613	14,451,655,498	10,853,375,115	75.10
ASET TETAP				
Tanah	155,787,621,000	155,787,621,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	22,644,926,101	22,644,926,101	0	0.00
Gedung dan Bangunan	54,231,565,743	54,231,565,743	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,440,123,361	27,440,123,361	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(34,274,784,017)	(31,813,450,065)	(2,461,333,952)	7.74
JUMLAH ASET TETAP	225,829,452,188	228,290,786,140	(2,461,333,952)	(1.08)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,345,719,500	3,345,719,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(858,322,870)	(817,965,905)	(40,356,965)	4.93
JUMLAH ASET LAINNYA	2,487,396,630	2,527,753,595	(40,356,965)	(1.60)
JUMLAH ASET	253,621,879,431	245,270,195,233	8,351,684,198	3.41
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,654,629,574	52,739,551	1,601,890,023	3,037.36
Utang Yang Belum Ditagihkan	391,321,984	0	391,321,984	0.00
Uang Muka dari KPPN	325,000,000	0	325,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,370,951,558	52,739,551	2,318,212,007	4,395.59
JUMLAH KEWAJIBAN	2,370,951,558	52,739,551	2,318,212,007	4,395.59
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	251,250,927,873	245,217,455,682	6,033,472,191	2.46
JUMLAH EKUITAS	251,250,927,873	245,217,455,682	6,033,472,191	2.46
JUMLAH EKUITAS	251,250,927,873	245,217,455,682	6,033,472,191	2.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	253,621,879,431	245,270,195,233	8,351,684,198	3.41

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



[Signature]

FAROUK MOCHTAR, S.PT, MP

197504232002121001 197504232002121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
SATUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS 239434

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM
Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,250,000,000	1,556,502,934	(693,497,066)	69	2,237,960,000	1,078,542,706	1,159,417,294	48
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,250,000,000	1,556,502,934	(693,497,066)	69	2,237,960,000	1,078,542,706	1,159,417,294	48
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,250,000,000	1,556,502,934	(693,497,066)	69	2,237,960,000	1,078,542,706	1,159,417,294	48
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	37,651,211,000	11,813,947,887	(25,837,263,113)	31	36,426,557,000	14,734,231,622	21,692,325,378	40
1. Belanja Pegawai	6,422,022,000	3,533,137,666	(2,888,884,334)	55	5,071,046,000	3,016,505,973	2,054,540,027	59
2. Belanja Barang	31,229,189,000	8,280,810,221	(22,948,378,779)	27	30,229,220,000	11,676,140,229	18,553,079,771	39
3. Belanja Modal	0	0	0	0	1,126,291,000	41,585,420	1,084,705,580	4
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
SATUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS 239434

Tgl Data : 14/07/26 6:38 PM
Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	37,651,211,000	11,813,947,887	(25,837,263,113)	31	36,426,557,000	14,734,231,622	21,692,325,378	40
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Padang Mengatas, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

FAROUK MOCHTAR, S.P.T, MP
BPTU - HONGKONG
PADANG MENGATAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI

: (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA

: (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Tgl Data : 14/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 14/07/26 8:58 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	245,217,455,682	244,157,132,794	1,060,322,888	0.43
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,456,935,726)	(12,440,311,456)	(1,016,624,270)	8.17
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,268,500,000	0	9,268,500,000	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	9,268,500,000	0	9,268,500,000	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,221,907,917	13,673,688,916	(3,451,780,999)	(25.24)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,033,472,191	1,233,377,460	4,800,094,731	389.18
EKUITAS AKHIR	251,250,927,873	245,390,510,254	5,860,417,619	2.39

Keterangan :

FINAL

Padang Mengatas, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



FAROUK MOCHTAR, S.PT, MP

197504232002121001